



BAB I

PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda mempunyai tugas membentuk Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana terulang dalam peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tugas tersebut Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Bappeda terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub bagian Evaluasi.
4. Bidang Fisik Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup.
5. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian kebijakan Perundangan-undangan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu dengan diperolehnya piagam penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai 10 besara terbaik perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota. Diharapkan tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan yaitu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini disajikan dengan Basis Akrul sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrul;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrul pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Kebijakan Umum dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Umum APBD
- 2.2 Pencapaian Target Kinerja

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3.1 Pengukuran Pendapatan
 - 4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja
 - 4.3.3 Pengukuran Transfer
 - 4.3.4 Pengukuran Pembiayaan
 - 4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas
 - 4.3.6 Pengukuran Piutang
 - 4.3.7 Pengukuran Persediaan
 - 4.3.8 Pengukuran Investasi
 - 4.3.9 Pengukuran Aset Tetap
 - 4.3.10 Penyusutan Aset Tetap
 - 4.3.11 Pengukuran Konstruksi dalam Pengerjaan
 - 4.3.12 Pengukuran Aset Lain
 - 4.3.13 Pengukuran Kewajiban



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- 4.3.14 Pengukuran Ekuitas
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
 - 4.4.1 Koreksi Kesalahan
 - 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.1.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5.1.1.1.4.1 Dana Alokasi Umum

5.1.1.1.4.2 Dana Alokasi Khusus

5.1.1.1.5 Transfer Pemerintah Lainnya-Dana Penyesuaian

5.1.1.1.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.1.1.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Provinsi

5.1.1.1.8 Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.2 Pendapatan Lainnya

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Operasi

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

5.1.2.2 Belanja Modal

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.3 Belanja Aset Lainnya

5.1.2.4 Belanja Tidak Terduga



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- 5.1.3 Pembiayaan Netto
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
- 5.1.4 Pembiayaan
- 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Belanja
 - 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
 - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah
 - 5.3.1.2 Kas di Bendahara Daerah
 - 5.3.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan
 - 5.3.1.4 Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional
 - 5.3.1.5 Kas di Bendahara Badan Jaminan Umum Daerah
 - 5.3.1.6 Kas Lain-lain
 - 5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek
 - 5.3.1.8 Piutang Pajak
 - 5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak
 - 5.3.1.9 Piutang Retribusi
 - 5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi
 - 5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - 5.4.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah
 - 5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi
 - 5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - 5.3.1.13 Persediaan
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.2.1 Investasi Non Permanen
 - 5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.3.1 Tanah
 - 5.3.3.2 Peralatan dan Mesin
 - 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan
 - 5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya
 - 5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- 5.3.4 Dana Cadangan
- 5.3.5 Aset Lainnya
 - 5.3.5.1 Aset Tak Berwujud
 - 5.3.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud
 - 5.3.5.3 Aset Lain-lain
 - 5.3.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
- 5.3.6 Kewajiban
 - 5.3.6.1 Kewajiban JAngka Pendek
 - 5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
 - 5.3.6.3 Utang Bunga
 - 5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka
 - 5.3.6.6 Utang Beban
 - 5.3.6.7 Utang Jangka Pendek Lainnya
- 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2.1 Pendapatan Asli Daerah-LO
 - 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO
 - 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO
 - 5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
 - 5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Aseli Daerah yang Sah-LO
 - 5.4.2.2 Pendapatan Transfer-LO
 - 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO
 - 5.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak-LO
 - 5.4.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO
 - 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum-LO
 - 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
 - 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi-LO
 - 5.4.1.2.4 Bantuan Keuangan-LO
 - 5.4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
 - 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO
 - 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO
 - 5.4.2 Beban-LO
 - 5.4.2.1 Beban Operasi
 - 5.4.2.1.1 Beban Pegawai
 - 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa
 - 5.4.2.1.3 Beban Hibah
 - 5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial
 - 5.4.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

5.4.2.1.7 Beban Prgawai BOS

5.4.2.2 Beban Transfer

5.4.2.2.1 Surplus/Defisit-LO

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.5.1 Ekuitas Awal

5.5.2 Surplus/Defisit-LO

5.5.3 Koreksi-Koreksi

5.5.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KOTA BANJARBARU

TAHUN 2019

2.1 Kebijakan Umum APBD

Sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Klasifikasi belanja tersebut diatas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, menurut kelompok belanja terdiri dari belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai saja.

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal.

2.2 Pencapaian Target Kinerja

Bappeda Kota Banjarbaru selama tahun 2019 telah melaksanakan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Sasaran-sasaran tahun 2019 pada Bappeda Kota Banjarbaru telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2019 adalah sebagaimana dalam table berikut :



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

TABEL 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banjarbaru
Tahun 2019

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkatkan keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	96,79%
2	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Prosentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan Musrenbang	100%	98,39%
3	Meningkatkan dokumen hasil kajian/penelitian untuk menjadi bahan kebijakan pembangunan	Prosentase kajian/penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan pada kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru	100%	80%
4	Meningkatkan penerapan inovasi daerah yang difasilitasi oleh perangkat daerah	Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	28,13%
5	Meningkatkan penerapan kebijakan inovasi di daerah	Prosentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%

Capaian atas indikator kinerja diatas didukung melalui program-program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
7. Perencanaan Sosial dan Budaya
8. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
9. Pengembangan dan Penelitian.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Adapun pencapaian target kinerja Bappeda Kota Banjarbaru tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN TARGET KINERJA BAPPEDA KOTA BANJARBARU

NO	KODE PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	%
	4.03.4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.933.313.876		
1	4.03.4.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	256.830.000	176.769.998	68,83%
2	4.03.4.03.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	18.000.000	18.000.000	100%
3	4.03.4.03.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.592.000	23.592.000	100%
4	4.03.4.03.01.01.01.11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	42.150.000	42.150.000	100%
5	4.03.4.03.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.100.000	47.100.000	100%
6	4.03.4.03.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.124.000	11.124.000	100%
7	4.03.4.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan Dan Minuman	101.928.000	94.740.000	92,95%
8	4.03.4.03.01.01.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.162.829.876	1.115.249.865	95,91%
9	4.03.4.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	269.760.000	253.250.000	93,88%
	4.03.4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	905.294.999		
1	4.03.4.03.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	80.000.000	77.900.000	97,38%
2	4.03.4.03.01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	107.850.000	106.945.000	99,16%
3	4.03.4.03.01.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	321.250.000	305.469.320	95,09%
4	4.03.4.03.01.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	32.349.999	28.143.900	97,00%
5	4.03.4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	124.280.000	117.310.000	94,39%
6	4.03.4.03.01.01.02.23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	40.000.000	28.444.800	71,11%



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

7	4.03.4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	129.461.000	94.310.800	72,85%
8	4.03.4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11.750.000	9.450.000	80,43%
9	4.03.4.03.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	58.354.000	49.906.000	85,52%
	4.03.4.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.750.000		
1	4.03.4.03.01.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	24.750.000	24.475.000	98,89%
	4.03.4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.872.000		
1	4.03.4.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.290.000	27.990.500	95,56%
2	4.03.4.03.01.01.06.05	Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan	30.582.000	30.537.000	99,85%
3	4.03.4.03.01.01.06.09	Perencanaan Dan Pelaporan Manajemen	6.000.000	6.000.000	100%
	4.03.4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	777.373.000		
1	4.03.4.03.01.01.21.08	Penyusunan RKPD	280.028.000	271.028.000	96,79%
2	4.03.4.03.01.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	224.772.000	221.152.000	98,39%
3	4.03.4.03.01.01.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	97.755.000	80.275.000	82,12%
4	4.03.4.03.01.01.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan	38.359.000	37.519.000	97,81%
5	4.03.4.03.01.01.21.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	74.970.000	55.549.000	74,09%
6	4.03.4.03.01.01.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	61.489.000	45.949.000	74,73%
	4.03.4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	251.609.000		
1	4.03.4.03.01.01.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	13.925.500	12.936.000	92,89%



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

2	4.03.4.03.01.01.22.10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	237.683.500	206.545.250	86,90%
	4.03.4.03.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	523.734.000		
1	4.03.4.03.01.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	79.929.000	32.966.000	41,24%
2	4.03.4.03.01.01.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	34.500.000	30.601.000	88,70%
3	4.03.4.03.01.01.23.07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	274.639.000	261.763.950	95,31%
4	4.03.4.03.01.01.23.08	Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat	134.666.000	79.650.000	59,15%
	4.03.4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	2.526.967.250		
1	4.03.4.03.01.01.24.07	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	22.716.050	22.716.050	100%
2	4.03.4.03.01.01.24.08	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	1.229.140.200	1.127.536.700	91,73%
3	4.03.4.03.01.01.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	1.275.111.000	1.155.709.500	90,64%
	4.03.4.03.01.01.26	Program Pengembangan dan Penelitian	467.518.500		
1	4.03.4.03.01.01.26.01	Diseminasi Hasil Penelitian	24.515.500	14.215.500	57,99%
2	4.03.4.03.01.01.26.05	Jaringan Penelitian	9.276.000	5.415.000	58,38%
3	4.03.4.03.01.01.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	161.262.000	142.640.000	88,45%
4	4.03.4.03.01.01.26.07	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, inovasi dan Teknologi	%	212.330.000	77,93%
JUMLAH			7.476.432.625	6.705.355.133	89,68%



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mendapat dukungan dana sebesar Rp 11.192.133.645,- dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 389.526.632,- atau naik sebesar 9,65 % jika dibandingkan dengan tahun 2018, yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Bappeda

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.715.701.020	3.714.055.728	99,9
2	BELANJA LANGSUNG			
	APBD	7.476.432.625	6.705.355.133	89,68
	JUMLAH	11.192.133.645	10.419.410.861	93,06

Pada Tahun Anggaran 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru mendapat dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.715.701.020,- dan terealisasi sebesar Rp 3.714.055.728,- atau sebesar 99,9 %. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2018 yang sebesar Rp 3.572.331.186,- realisasi tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 141.724.542,- atau sebesar 96,18 % dari realisasi tahun lalu.

Sementara dari sisi Belanja Langsung untuk tahun anggaran 2019, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan sebesar Rp 7.476.432.625,- dan terealisasi sebesar Rp 6.705.355.133,- atau sebesar 89,68 %. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2018 yang sebesar Rp 6.562.186.604,- realisasi belanja tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 143.168.529,- atau sebesar 97,86 %.

Jika dilihat dari pencapaian realisasi keuangan yang menunjukkan 93,06 %, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2019 sangat baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 96,67 %. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 41 kegiatan hanya ada 2 kegiatan yang tidak memenuhi target output.

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 1. Ada beberapa SKPD yang ingin kegiatan untuk dikoordinasikan secara intensif mengingat adanya amanat Pemerintah Pusat seperti Gender, KLA, Stunting, Germas akan tetapi alokasi waktu yang tersisa (ABT) sangat sempit dan banyaknya berbenturan waktu dengan kegiatan rutin lainnya sehingga tidak semua kegiatan menyerap anggaran cukup dengan efektifitas waktu yang ada untuk menyelesaikan semua kegiatan.
- b. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Kota Sehat
 1. Untuk mempersiapkan dokumen KKS sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait akan tetapi dengan ketersediaan waktu yang tidak memungkinkan koordinasi dapat dilakukan dengan jemput bola melalui SKPD terkait dan pengumpulan data melalui group WA sehingga penganggaran dapat dipangkas.
 2. Persiapan penilaian KKS 2019 oleh Tim KKS Provinsi dan Tim KKS Pusat dipersiapkan anggaran di APBD-P 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan penilaian diefektifkan oleh Tim Penilai sehingga anggaran tidak semua terserap.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran

atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
- (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.

d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai

wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
 - c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang

dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.

- b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Deposito LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Deposito –LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/ normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapit

alisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 dan 2014

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah				
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
TOTAL					



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Pajak Daerah			
2	Retribusi Daerah			
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			
4	Lain-Lain PAD yang Sah			
TOTAL				

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Pajak Hotel			
2	Pajak Restoran			
3	Pajak Hiburan			
4	Pajak Reklame			
5	Pajak Penerangan Jalan			
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

7	Pajak Parkir			
8	Pajak Air Bawah Tanah			
9	Pajak Bumi dan Bangunan			
10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			
TOTAL				

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

0

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum			
2	Retribusi Jasa Usaha			
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
TOTAL				

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

0

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan- Puskesmas			
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan			
3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum			
4	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios			
5	Retribusi PKB-Mobil Barang/ Beban-Pick Up			
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

0

0

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan			
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Kendaraan Bermotor			
3	Retribusi Terminal			
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
5	Retribusi Tempat Pariwisata			
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi			
3	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan			
4	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan			
TOTAL				

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bank Kal-Sel			
TOTAL				

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Penerimaan Jasa Giro	-	Ada tempat umami	
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)			
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan			
4	Pendapatan Denda Pajak			
5	Pendapatan Dari Pengembalian			
6	Pendapatan BLUD			
7	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya			
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya			
3	Transfer Pemerintah Provinsi			
4	Pendapatan Lainnya			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak			
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
3	Dana Alokasi Umum			
4	Dana Alokasi Khusus			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan			
2	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi			
TOTAL				

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan			
2	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)			
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)			
4	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan			
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi			
TOTAL				

5.1.1.1.4.1 Dana Alokasi Umum

5.1.1.1.4.2 Dana Alokasi Khusus

Tabel Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

N o	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	DAK Bidang Pendidikan			
2	DAK Bidang Ke sehatan			
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan			
4	DAK Bidang Infrstruktur Irigasi			
5	DAK BidangInfrastruktur Air Minum			
6	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi			
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan			
8	DAK Bidang Pertanian			
9	DAK Bidang Lingkungan Hidup			
10	DAK Bidang Keluarga Berencana			
11	DAK Bidang Kehutanan			
12	DAK Bidang Perdagangan			
13	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat			
14	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.1.1.5 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD			
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD			
TOTAL				

5.1.1.1.6 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5.1.1.1.7 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor			
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
5	Bagi Hasil Pajak Rokok			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.1.1.8 Transfer Pemerintah Provinsi

Tabel Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi			
TOTAL				

5.1.1.2 Pendapatan Lainnya

31 Desember 2019

(Rp)

0

31 Desember 2018

(Rp)

0,00

Tabel Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah			
TOTAL				

5.1.2 Belanja

31 Desember 2019

(Rp)

10.419.410.861,-

31 Desember 2018

(Rp)

10.134.517.790,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	8.900.833.646	8.370.735.691	94,04	9.264.841.290
2	Belanja Modal	2.291.299.999	2.048.675.170	89,41	869.676.500
3	Belanja Tidak Terduga				0
TOTAL		11.192.133.645	10.419.410.861	93,10	10.134.517.790

5.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2019

(Rp)

8.370.735.691,-

31 Desember 2018

(Rp)

9.264.841.290,-

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.715.701.020	3.714.055.728	99,96
2	Belanja Barang dan Jasa	5.173.732.626	4.645.279.963	89,79
3	Hibah	11.400.000	11.400.000	100,00
4	Bantuan Sosial			
5	Bantuan Keuangan			
TOTAL		8.900.833.646	8.370.735.691	94,04

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.253.820.747	2.253.820.747	100,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.461.880.273	1.460.234.981	99,89
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH			
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
5	Belanja Penghasilan Lainnya			
6	Uang Lembur			
7	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			
8	Belanja Honorarium Non Pegawai			
9	Belanja Pegawai Operasional BLUD			
TOTAL		3.715.701.020	3.714.055.728	99,96

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	305.297.000	292.858.000	95,93
2	Belanja Bahan/Material			
3	Belanja Jasa Kantor	1.605.154.000	1.463.355.998	91,17
4	Belanja Premi Asuransi			
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78.981.000	35.880.600	45,43
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.613.750	349.480.500	88,79
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
9	Belanja Sewa Alat Berat			
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	16.300.000	15.400.000	94,48
11	Belanja Makanan dan Minuman	585.117.000	425.629.000	72,74
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
13	Belanja Pakaian Kerja			
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	24.750.000	24.475.000	98,89
15	Belanja Perjalanan Dinas	1.275.509.876	1.214.449.865	95,21
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS			
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			
18	Belanja Pemeliharaan	126.400.000	113.826.000	90,05



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

19	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	505.200.000	472.275.000	93,48
20	Belanja Honorarium Non PNS	257.410.000	237.650.000	92,32
21	Belanja Jasa Konsultasi			
22	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga			
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD			
24	Belanja Sewa Kesenian dan Budaya			
TOTAL		5.173.732.626	4.645.279.963	89,79

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
2	Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.400.000	11.400.000	100,00
TOTAL		11.400.000	11.400.000	100,00



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat			
TOTAL				

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik			
TOTAL				

5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2019

(Rp)

2.048.675.170,-

31 Desember 2018

(Rp)

869.676.500,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan dan Mesin	541.449.999	518.458.220	95,75
3	Belanja Gedung dan Bangunan			
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.980.000	56.240.000	93,76
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.599.870.000	1.385.476.950	86,60
6	Belanja Aset Lainnya	90.000.000	88.500.000	98,33
TOTAL		2.291.299.999	2.048.675.170	89,41

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Tanah Perkampungan			
2	Kebun Campuran			
3	Tanah untuk Bangunan Gedung			
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Bukan Gedung			
TOTAL				

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat			
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu			
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	80.000.000	77.900.000	97,38
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin			
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin			
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur			
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan			
9	Belanja Mdl Pengadaan Alat PemeliharaanTanaman/Alat Penyimpan			
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	2.500.000	2.500.000	100,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	97.100.000	96.145.000	99,02
12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	290.550.000	275.019.320	94,65



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.349.999	28.143.900	87,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	38.950.000	38.750.000	99,49
15	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi			
16	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar			
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran			
18	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan			
19	Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium			
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah			
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika			
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan			
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup			
24	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika			



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
25	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api			
26	Belanja Modal Pengadaan Amunisi			
27	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan			
28	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit			
TOTAL		541.449.999	518.458.220	95,75

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu			
TOTAL				



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan			
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan			
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut			
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana			
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor			
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih			
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah			
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik			
9	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pertahanan			
10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum			
11	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	59.980.000	56.240.000	93,76



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

12	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon			
TOTAL		59.980.000	56.240.000	93,76

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	1.599.870.000	1.385.476.950	86,60
2	Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan			
3	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan			
5	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			
TOTAL		1.599.870.000	1.385.476.950	86,60

5.1.2.3 Belanja Aset Lainnya

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	88.500.000	98,33
2	Belanja Modal Pengadaan Aset Lain-Lain			
TOTAL		90.000.000	88.500.000	98,33



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.2.4 Belanja Tidak Terduga

Surplus/Defisit LRA

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

772.722.784,-

668.089.223,-

Tabel Surplus/Defisit LRA

5.1.3 Pembiayaan Netto

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

10.419.410.861,-

10.134.517.790,-

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit LRA

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja	11.192.133.645	10.419.410.861	93,10	10.134.517.790
Surplus/Defisit			772.722.784	6,90	668.089.223



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
2	Pencairan Dana Cadangan			
TOTAL				

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%
1	Penyertaan Modal pada Bank			
2	Penyertaan Modal pada PDAM			
3	Penyertaan Modal pada Bangun Banua			
TOTAL				

5.1.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

772.722.784,-

668.089.223,-

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Realisasi TA 2018 (Rp)
1	Pendapatan				
2	Belanja	11.192.133.645	10.419.410.861	93,10	10.134.517.790
3	Surplus (Defisit)				
4	Pembiayaan Netto				
SILPA			772.722.784	6,90	668.089.223



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
	<hr/>	<hr/>

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
	<hr/>	<hr/>

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
11.192.133.645,-	10.419.410.861,-	10.134.517.790,-
	<hr/>	<hr/>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) adalah selisih dari anggaran yang tersedia dengan realisasi. Anggaran belanja Tahun 2019 sebesar Rp.11.192.133.645,- dikurangi dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp.10.419.410.861,- maka didapat SiLPA tahun 2019 sebesar Rp.772.722.784,- atau 6,90%

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Anggaran TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2018 (Rp)
	<hr/>	<hr/>

5.3 NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Bappeda Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Aset Bappeda Kota Banjarbaru per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 3.595.909.635,57 dan Rp 1.951.320.729,64 Saldo Aset per 31 Desember 2019 **Naik** sebesar Rp 1.644.588.905,93 atau sebesar 84,28% dari Saldo Aset per 31 Desember 2018. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

5.3.1 Aset Lancar

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

(Rupiah)

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.3 Kas Di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.1.4 Kas Di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.5 Kas Di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.6 Kas Lain-lain

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.7 Investasi Jangka Pendek

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.8 Piutang Pajak

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.1.9 Piutang Retribusi

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

(Rupiah)

5.3.1.10 Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Sah

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.11 Piutang Bagi Hasil Provinsi

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-

5.3.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.1.13 Persediaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
638.000,-	1.297.000,-

Nilai Persediaan di akhir tahun 2019 sebesar Rp.638.000,- merupakan barang habis pakai yang terdiri dari :

- Alat Tulis Kantor sebesar Rp.505.000,-
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.110.000,- dan
- Bahan cetakan sebesar Rp.23.000,-

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.2.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(Rp)	(Rp)
-	-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.3 Aset Tetap

31 Desember 2019

(Rp)

3.356.740.342,37

31 Desember 2018

(Rp)

1.731.436.236,44

Komponen Aset Tetap	Tahun 2019	Tahun 2018
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.710.411.712,92	2.243.118.924,18
Gedung dan Bangunan	638.989.600	638.989.600,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.945.000	47.705.000,00
Aset Tetap Lainnya	2.112.728.010	727.251.060,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Aset Tetap	5.566.074.322,92	3.657.064.584,18

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.243.118.924,18	2.710.411.712,92	467.292.788.74	17.24
Gedung dan Bangunan	638.989.600,00	638.989.600	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.705.000,00	103.945.000	56.240.000.00	54.11
Aset Tetap Lainnya	727.251.060,00	2.112.728.010	1,385,476,950.00	65.58
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Aset Tetap	3.657.064.584,18	5.566.074.322,92	1,909,009,738.74	34.30

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1							
2							
3							
4							
5							

Secara total Aset tetap terjadi kenaikan, untuk peralatan dan mesin terjadi kenaikan dikarenakan adanya nilai penambahan Peralatan dan Mesin (belanja modal dan mutasi masuk antar SKPD (mesin absensi) lebih tinggi daripada Pengurangan yang terdiri dari Reklass ke Extracomptable, Penghapusan Aset dan Reklass antar KIB (ke Aset Lainnya Rusak Berat)

Untuk Aset Gedung tidak terjadi perubahan nilai. Pada Aset Jalan, Irigasi dan jaringan hanya bertambah belanja modal instalasi jaringan air. Untuk Aset Tetap lainnya terjadi

kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp.1.385.476.950,- atau 65,58% yang disebabkan oleh belanja modal.

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2019
(Rp)

31 Desember 2018
(Rp)

-

-

No.	URAIAN	TANAH
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

No	Tahun Perolehan	Kode Barang	Register	Uraian	Nilai

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

C. Penambahan Aset Tetap-Tanah Tahun sebesar Rp

Rincian Daftar Belanja Modal Tanah Bangunan Pasar

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah Bangunan Pasar Landasan Ulin	
2.	Tanah Bangunan Pasar Liang Anggang	
3.	Tanah Bangunan Pasar Banjarbaru Utara	
4.	Tanah Bangunan Pasar Cempaka	
Total		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Rincian Daftar Mutasi Tanah Bangunan Antar SKPD

No.	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Nilai (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Tanah tahun sebesar Rp

NO .	KODE BARANG	Jenis Barang / Nama Barang	Persil	Keterangan			
				Sertifikat	Sporadik	SKT	Tanpa Keterangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019

(Rp)

2.710.411.712,92

31 Desember 2018

(Rp)

2.243.118.924,18

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
8		
9		
10		

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp. 55.684.716,97

No	Kode Barang	URAIAN	Perubahan Kebijakan Aset jadi Extra
1	BBA	Extra Comptable	5.786.096,28
2			
3			
4			
			5.786.096,28

Ada beberapa Aset yang nilai perolehannya berdasarkan kebijakan tidak lagi menjadi aset yang masuk kategori peralatan dan mesin sehingga harus direklass ke extracomptable

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi catat
1		Penghapusan 2019	23.458.620,69
2		Reklass antar KIB (ke asset Rusak Berat)	26.440.000,00
3			
4			
			49.898.620,69

Aset peralatan dan mesin yang sudah rusak berat harus dilakukan penghapusan, Aset Peralatan dan Mesin Bappeda Kota Banjarbaru yang rusak berat sebesar Rp.26.440.000,- dihapuskan dengan melakukan reklass antar KIB (ke asset lainnya (RB))
Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin juga terjadi karena penghapusan asset peralatan dan mesin sebesar Rp.23.458.620,69,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp. 522.977.505,71

No	SKPD	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	Bappeda	Sepeda Motor	2019			19,475,000.00
2	Bappeda	Sepeda Motor	2019			19,475,000.00
3	Bappeda	Sepeda Motor	2019			19,475,000.00
4	Bappeda	Sepeda Motor	2019			19,475,000.00
5	Bappeda	Lemari Besi	2019			2,220,000.00
6	Bappeda	Lemari Besi	2019			2,220,000.00
7	Bappeda	Rak Besi/Metal	2019			1,619,000.00
8	Bappeda	Rak Besi/Metal	2019			1,619,000.00
9	Bappeda	Rak Besi/Metal	2019			1,619,000.00
10	Bappeda	Rak Besi/Metal	2019			1,619,000.00
11	Bappeda	Rak Besi/Metal	2019			1,619,000.00
12	Bappeda	Filling Besi/Metal	2019			2,500,000.00
13	Bappeda	Kursi Rapat	2019			4,036,300.00
14	Bappeda	Kursi Rapat	2019			4,036,300.00
15	Bappeda	Kursi Rapat	2019			4,036,300.00
16	Bappeda	Gordyn	2019			30,445,000.00
17	Bappeda	AC Split	2019			7,612,500.00
18	Bappeda	AC Split	2019			7,612,500.00
19	Bappeda	AC Split	2019			7,612,500.00
20	Bappeda	AC Split	2019			7,612,500.00
21	Bappeda	Sound System	2019			35,250,000.00
22	Bappeda	P.C Unit/ Komputer PC	2019			8,500,000.00
23	Bappeda	P.C Unit/ Komputer PC	2019			8,500,000.00
24	Bappeda	P.C Unit/ Komputer PC	2019			8,172,321.43
25	Bappeda	P.C Unit/ Komputer PC	2019			8,172,321.43
26	Bappeda	Lap Top	2019			11,883,580.00
27	Bappeda	Lap Top	2019			11,883,580.00
28	Bappeda	Lap Top	2019			11,883,580.00
29	Bappeda	Lap Top	2019			11,883,580.00
30	Bappeda	Lap Top	2019			24,500,000.00
31	Bappeda	Lap Top	2019			18,500,000.00
32	Bappeda	Lap Top	2019			12,561,160.71
33	Bappeda	Lap Top	2019			12,561,160.71
34	Bappeda	Note Book	2019			24,819,545.32
35	Bappeda	Note Book	2019			17,272,727.27
36	Bappeda	Printer	2019			8,565,454.68
37	Bappeda	Printer	2019			3,000,000.00
38	Bappeda	Printer	2019			3,000,000.00
39	Bappeda	Printer	2019			3,000,000.00
40	Bappeda	Printer	2019			2,946,524.06
41	Bappeda	Printer	2019			2,946,524.06
42	Bappeda	Printer	2019			3,000,000.00
43	Bappeda	Printer	2019			7,250,000.00
44	Bappeda	Printer	2019			7,250,000.00
45	Bappeda	Printer	2019			6,558,035.71



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD	Nama Barang	Tahun	Jlh Unit	Harga Satuan	Jumlah
46	Bappeda	Scanner	2019			2,750,000.00
47	Bappeda	UPS	2019			1,524,064.17
48	Bappeda	UPS	2019			1,524,064.17
49	Bappeda	UPS	2019			1,412,500.00
50	Bappeda	UPS	2019			1,412,500.00
51	Bappeda	Camera Electronic	2019			8,448,107.05
52	Bappeda	Remote Control Unit	2019			30,301,892.95
53	Bappeda	Personal Komputer	2019			8,500,000.00
54	Bappeda	Personal Komputer	2019			8,500,000.00
55	Bappeda	Personal Komputer	2019			8,500,000.00
56	Bappeda	Meja Kerja	2019			1,000,000.00
57	Bappeda	Meja Kerja	2019			1,000,000.00
58	Bappeda	Meja Kerja	2019			750,000.00
59	Bappeda	Meja Kerja	2019			750,000.00
60	Bappeda	Stabilizer/Stavolt	2019			762,032.10
61	Bappeda	Stabilizer/Stavolt	2019			762,032.09
62	Bappeda	Stabilizer/Stavolt	2019			762,032.09
						518,458,220.00

No	Kode Barang	URAIAN	Koreksi catat
1		Mutasi antar SKPD (Mesin Absensi)	4.519.285,71
2			
3			
4			
			4.519.285,71

5.3.3.3

Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019

31 Desember 2018

(Rp)

(Rp)

638.989.600,-

638.989.600,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2018	638,989,600.00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
4	Saldo Awal 2019	638,989,600
5	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2019	-
	b. Retensi 5%	-
	c. Belanja Pegawai 2019	-
	d. Belanja Barang Jasa 2019	-
	e. BOP/BOS/BOM	-
	f. Hibah	-
	g. Penambahan KDP	-
	h. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	-
6	Pengurangan :	
	a. Pengurangan KDP	-
	b. Non Aset	-
	c. Ekstra	-
	d. Penghapusan	-
	e. Pengembalian Dana	-
	f. Reklas ke RB	-
	g. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Kenaikan Tahun 2019	-
	Saldo Per 31 Desember 2019	638,989,600.00

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp 0,-
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tetap-gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp.0,-

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		
Jumlah		

5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2019
(Rp)
103.945.000,-

31 Desember 2018
(Rp)
47.705.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 2018	47,705,000.00
a.	Koreksi Kurang	-
b.	Koreksi Tambah	-
2	Saldo setelah koreksi	47,705,000.00
3	Penambahan :	
a.	Belanja Modal 2019	56,240,000.00
b.	Retensi 5%	-
c.	BOP/BOS/BOM	-
d.	Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	56,240,000.00
4	Pengurangan	
a.	KDP	-
b.	Non Aset	-
c.	Pengembalian Dana	-
d.	Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	0.00
5	Saldo Akhir 2019	103,945,000.00

- A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp.0,-
- B. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp.56.240.000,-
- C. Penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp.56.240.000,-

Daftar Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019

No.	NAMA SKPD	Jumlah	Retensi 5 %
1	Bappeda	56.240.000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Jumlah	56.240.000	

5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019
(Rp)
2.112.728.010,-

31 Desember 2018
(Rp)
727.251.060,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akhir 2018	727,251,060.00
	a. Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2019	727,251,060.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2019	1,385,476,950.00
	b. Belanja Barang Jasa 2019	-
	c. BOP/BOS/BOM	-
	d. Hibah	-
	e. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	1,385,476,950.00
3	Pengurangan :	
	a. Ekstra	-
	b. Penghapusan	-
	c. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2019	1,385,476,950.00
	Jumlah	2,112,728,010.00

A. Penambahan Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp.1.385.476.950,-

No.	NAMA SKPD	Jumlah
1	Bappeda	1.385.476.950
2		
3		
3		
4		
5		
	Jumlah	1.385.476.950

B. Pengurangan terhadap Saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar Rp.0,-

NO.	URAIAN	NILAI (Rp)
1		
2		
3		

5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019
(Rp)
2.209.333.980,55

31 Desember 2018
(Rp)
1.925.628.347,74



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Nilai Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,968,223,551.29
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	173,443,429.27
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	50,517,000.00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	17,150,000.00
Jumlah Akumulasi Penyusutan Tahun 2019		2,209,333,980.56

5.3.4 Dana Cadangan

31 Desember 2019
(Rp)

-

31 Desember 2018
(Rp)

-

URAIAN	SAMPAI DENGAN 2014			SAMPAI DENGAN 2015		
	POKOK	BUNGA	JUMLAH	POKOK	BUNGA	JUMLAH
BRI						
BTN						
BANK KALSEL 1						
BNI						
BANK KALSEL 2.1						
BANK KALSEL 2.2						
BRI						
JUMLAH						

5.3.5 Aset Lainnya

5.3.5.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2019
(Rp)

370.031.000,-

31 Desember 2018
(Rp)

281.531.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	
1	Saldo awal	281,531,000.00
2	Koreksi Kurang	-
3	Koreksi Tambah	-
	Saldo Awal 2019	281,531,000.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2019	88,500,000.00
	b. Belanja Barang jasa 2019	-
	c. Mutasi Tambah	-
	Jumlah Penambahan	88,500,000.00
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2019	88,500,000.00
	Jumlah	370,031,000.00

- A. Koreksi kurang atas saldo aset tetap tak berwujud tahun 2019 sebesar Rp.0,-
- B. Koreksi tambah atas saldo aset tak berwujud tahun 2019 sebesar Rp.88.500.000,-
- C. Penambahan nilai aset tak berwujud Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda	88,500,000.00
2		
3		
4		
5		
	TOTAL	88,500,000.00

Belanja modal Aset tak berwujud tahun 2019 Berupa Pembuatan Video Profil Kota Banjarbaru

5.3.5.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

31 Desember 2019
(Rp)
156.012.400,-

31 Desember 2018
(Rp)
82.006.200,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	156.012.400
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Jumlah		156.012.400

5.3.5.3 Aset Lain-lain

31 Desember 2019
(Rp)
249.792.216,-

31 Desember 2018
(Rp)
223.352.216,-

No	Uraian	
1	Saldo awal	223,352,216.00
2	Koreksi Kurang	
3	Koreksi Tambah	
	Saldo Awal 2019	223,352,216.00
2	Penambahan :	
	a. Belanja Modal 2019	-
	b. Belanja Barang jasa 2019	
	c. Mutasi Tambah	26,440,000.00
	Jumlah Penambahan	26,440,000.00
3	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	-
	b. Mutasi Kurang	-
	Jumlah Pengurangan	-
	Total Penambahan Tahun 2019	26,440,000.00
	Jumlah	249,792,216.00

- A. Koreksi tambah atas saldo aset lain-lain tahun 2019 sebesar Rp. 26.440.000,-
- B. Penambahan nilai aset lain-lain Pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2019 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	26,440,000.00
2		
3		
4		
5		
	TOTAL	26,440,000.00

Penambahan sebesar Rp.26.440.000,- merupakan Reklass antar KIB dari Peralatan dan Mesin yang masuk kategori Rusak Berat.

C. Pengurangan aset lain-lain sebesar Rp.0,00 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)
Bappeda Kota Banjarbaru	0.00
	0.00
TOTAL	0.00

5.3.5.3.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2019

(Rp)

225.279.522,80

31 Desember 2018

(Rp)

204.289.522,80

No	SKPD	Nilai (Rp)
1	Bappeda Kota Banjarbaru	225.279.522,80
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	225.279.522,80



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

5.3.6 Kewajiban

31 Desember 2019

(Rp)

14.555.348,-

31 Desember 2018

(Rp)

10.172.770,-

(Rupiah)

No	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
1	Utang Beban	14.555.348	10.172.770
2			
3			
Jumlah		14.555.348	10.172.770

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

5.3.6.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

5.3.6.3 Utang Bunga

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

5.3.6.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

5.3.6.5 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

6.3.2.6 Utang Beban

31 Desember 2019

(Rp)

14.555.348,-

31 Desember 2018

(Rp)

10.172.770,-

Rupiah)

No	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
1	Belanja Telpon	78.024	120.830
2	Belanja Air	687.740	1.701.700
3	Belanja Listrik	5.704.584	5.002.740
4	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.085.000	3.347.500
5			
	JUMLAH	14.555.348	10.172.770

6.3.2.7 Utang Jangka Pendek lainnya

31 Desember 2019

(Rp)

-

31 Desember 2018

(Rp)

-

(Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1			
2			
3			
4			
	Jumlah		

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Kota Banjarbaru Tahun 2020 selanjutnya dikonsolidasi ke CALK Pemerintah Kota Banjarbaru yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian upaya untuk selalu menyajikan penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dengan sangat hati – hati dan penuh ketelitian tetapi, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2020 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2020 yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Segala masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik, dan bertekad untuk mempertahankan predikat WTP.

Banjarbaru, Januari 2020

KEPALA BAPPEDA KOTA BANJARBARU

Kanafi, S.IP,MM